



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAIZ MUHTADI ABDUL MUJIB**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **251329**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **419.987.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/29 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 47.987.000
2. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA JOMBANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.000.000
3. Tanah Seluas 1375 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 677 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 203.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **125.000.000**

1. MOTOR, HONDA SUPRA X HELM IN SUPRA X 125 HELM INI Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA ERTIGA GX / 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY FIC02N46L0 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. **---**

D. SURAT BERHARGA

Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. **60.000.000**

F. HARTA LAINNYA

Rp. **---**

Sub Total

Rp. **604.987.000**

III. HUTANG

Rp. **---**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. **604.987.000**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.